

PT. Bank Perkreditan Rakyat

Central Artha



**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2021**

PT. BPR CENTRAL ARTHA

Jln. Dr. Soetomo No. 53 Kota Tegal

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR CENTRAL ARTHA
TAHUN 2021**

PT. Bank Perkreditan Rakyat



**Jln. Dr. Sutomo No. 53 Kota Tegal
TELEPON: 0283 - 341741**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maka direktur beserta unit kerja yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyusun laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada PT BPR Central Artha.

Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, maka PT BPR Central Artha membuat laporan mengenai ruang lingkup pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dilakukan selama tahun 2021. Laporan ini meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank. Agar selaras dengan ketentuan OJK, maka aspek penerapan tata kelola meliputi:

Pengungkapan penerapan Tata Kelola

Kepemilikan saham direksi

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham BPR

Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris Lain anggota Direksi dan atau Pemegang Saham BPR

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Frekuensi rapat dewan komisaris

Jumlah penyimpangan internal

Permasalahan hukum yang dihadapi

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penerapan Good Corporate Governance merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. Hal ini dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat dengan pencapaian sesuai dengan visi dan misi PT BPR Central Artha.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Mengkoordinir seluruh Direksi atas pencapaian target sesuai dengan RBB yang sudah ditetapkan RUPS Perencanaan dan Pengembangan Core Bisnis Bank Bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran serta pengendalian dana pihak ketiga, baik dana masuk maupun keluar Membuat perencanaan dan penetapan strategis dalam upaya pengembangan bisnis BPR serta perluasan jaringan Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Monitoring aktifitas Operasional BPR terkait dengan menjaga likuiditas pengendalian anggaran biaya dan upaya peningkatan volume usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Bertanggungjawab terhadap pencapaian target yang sudah ditetapkan Menyusun dan membuat Visi dan Misi kebijakan-kebijakan terkait perundangan yang berlaku Penyusunan Budget Rencana Kerja Anggaran Membuat perencanaan dan pengembangan serta penerapan strategi anti fraud dalam pelaksanaan operasional BPR Mengevaluasi perkembangan kredit bermasalah dan langkah langkah penyelesaiannya Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi bagian penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah dan hukum Mengawal perencanaan pelaksanaan dan evaluasi bidang Satuan Kerja Audit Internal Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kesekretariatan Membantu tugas direksi lainnya		
2.	Nama	:	Bowo Susanto, S.E.
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Bertanggungjawab melaksanakan kebijakan Direktur Utama perihal Pertumbuhan Kredit serta pengendalian NPL dan mengevaluasi perkembangan kredit bermasalah dan langkah-langkah penyelesaiannya Penyusunan Budget Rencana Anggaran bagian-bagian dibawahnya Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi bidang Managemen Sumber Daya Manusia Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Tehnologi Informasi Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Bagian Umum dan Logistik Monitoring aktivitas operasional BPR terkait dengan menjaga pertumbuhan bisnis kualitas kredit pengendalian anggaran biaya dan upaya peningkatan volume usaha		

	sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran		
3.	Nama	:	Atika Rochyati, S.E.
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Bertanggungjawab melaksanakan kebijakan Direktur Utama perihal layanan operasional dan mengevaluasi semua kegiatan operasional dan langkah langkah penyelesaiannya Penyusunan Budget Rencana Anggaran bagian-bagian dibawahnya Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi bidang Managemen Risiko dan Kepatuhan Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi di bidang Keuangan dan Pelaporan Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi di bidang Treasury Monitoring aktivitas operasional BPR terkait dengan menjaga likuiditas pengendalian anggaran biaya dan upaya peningkatan volume usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Menyusun strategi pencapaian rencana kerja tahun 2021 Melakukan reorganisasi dan restaffing sosialisasi kepada segenap jajaran SDM di kantor pusat maupun cabang Menguraikan jabatan bagi karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana Membina SDM melalui peningkatan program pendidikan atau training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan dan melakukan tindak lanjut dari kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi mutasi promosi demosi pemberian penghargaan pemberhentian yang dapat menekan fluktuasi keluar masuk SDM Melaksanakan kebijakan direksi dalam mengembangkan kredit dan pendanaan berdasarkan prinsip kehati hatian yang diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi internal kontrol dan SKAI Fungsi audit dilaksanakan terhadap setiap segmen kredit yang mencakup pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip kehati hatian sampai dengan fungsi remedial dan kualias penagihan collection sebagai bagian dari mitigasi risiko SDM bagian kredit menjaga kolektibilitas kredit agar tidak memburuk terutama kegiatan cash pick up pembayaran angsuran maupun tabungan disatuan kerja yang ada Meningkatkan kualitas layanan Bank kepada nasabah melalui pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada Melakukan perbaikan secara berkelanjutan continously improvement untuk lebih mencapai tingka kepuasan nasabah yang prima customer satistaction			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Sapto Liyantoro
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Mengawasi dan membantu direksi dalam pengembangan bisnis dan SKAI dan Lending serta membantu tugas lainnya		

	Mengawasi dan membantu direksi dalam bidang Teknologi Informasi dan bisnis Kantor Cabang Memantau laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia terkait posisi perbankan moneter dan kegiatan perekonomian Memantau laporan keuangan khususnya posisi Neraca dan Laporan rugi laba yang disampaikan secara periodik dan dipublikasikan melalui berbagai media antara lain surat kabar website dll Menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun kecuali jika ada syarat resmi dari Menteri Keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan Memantau kewajiban keuangan bank kepada pihak ketiga antara lain pembayaran pajak fee penjaminan LPS dll Mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan mitra kerja Menjaga hubungan yang baik dan beretika dengan Pemilik bank Membantu mewujudkan kinerja bank yang sehat dan tumbuh secara wajar Memantau likuiditas bank atau kelancaran operasional bank Memantau solvabilitas bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya Memantau Rentabilitas atau tingkat keuntungan yang dicapai bank Menjaga Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (bonafiditas)		
2.	Nama	:	Risnawati Handayani
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Mengawasi dan membantu direksi dalam bidang Operasional serta membantu tugas lainnya Mengawasi dan membantu direksi dalam bidang Teknologi Informasi dan bisnis Kantor Cabang Memantau laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia terkait posisi perbankan moneter dan kegiatan perekonomian Memantau laporan keuangan khususnya posisi Neraca dan Laporan rugi laba yang disampaikan secara periodik dan dipublikasikan melalui berbagai media antara lain surat kabar website dll Menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun kecuali jika ada syarat resmi dari Menteri Keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan Memantau kewajiban keuangan bank kepada pihak ketiga antara lain pembayaran pajak fee penjaminan LPS dll Mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan mitra kerja Menjaga hubungan yang baik dan beretika dengan Pemilik bank Membantu mewujudkan kinerja bank yang sehat dan tumbuh secara wajar Memantau likuiditas bank atau kelancaran operasional bank Memantau solvabilitas bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya Memantau Rentabilitas atau tingkat keuntungan yang dicapai bank Menjaga Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (bonafiditas)		
3.	Nama	:	Hartana Satedja
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Mengawasi dan membantu direksi dalam pengembangan bisnis Funding dan SDM serta bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta membantu tugas lainnya Mengawasi dan membantu direksi dalam bidang Teknologi Informasi dan bisnis Kantor		

	Cabang Memantau laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia terkait posisi perbankan moneter dan kegiatan perekonomian Memantau laporan keuangan khususnya posisi Neraca dan Laporan rugi laba yang disampaikan secara periodik dan dipublikasikan melalui berbagai media antara lain surat kabar website dll Menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun kecuali jika ada syarat resmi dari Menteri Keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan Memantau kewajiban keuangan bank kepada pihak ketiga antara lain pembayaran pajak fee penjaminan LPS dll Mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan mitra kerja Menjaga hubungan yang baik dan beretika dengan Pemilik bank Membantu mewujudkan kinerja bank yang sehat dan tumbuh secara wajar Memantau likuiditas bank atau kelancaran operasional bank Memantau solvabilitas bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya Memantau Rentabilitas atau tingkat keuntungan yang dicapai bank Menjaga Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (bonafiditas)
	Rekomendasi Kepada Direksi :
	Strategi pencapaian Rencana Kerja tahun 2021 Pelaksanaan Kebijakan Direksi dalam melakukan reorganisasi dan restaffing serta sosialisasi kepada segenap jajaran SDM baik di Kantor Pusat maupun Cabang serta diimbangi oleh kejelasan dalam uraian jabatan bagi para karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana Pembinaan SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank yang dilakukan secara terus menerus Pelaksanaan kebijakan Direksi untuk mengembangkan kredit dan pendanaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi internal kontrol dan SKAI. SDM bagian kredit menjaga kolektibilitas kredit tidak memburuk terutama kegiatan cash pick up pembayaran angsuran maupun tabungan disatukan kerja yang ada Peningkatan kualitas layanan Bank kepada nasabah melalui pemberian pelayanan yang prima Perbaikan secara berkelanjutan continuously improvement untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima customer satisfaction
	Penjelasan Lebih Lanjut :

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Berkaitan dengan PT. BPR Central Artha dimana modal inti yang dimiliki masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka tidak wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas atau Fungsi Komite karena hanya BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) yang wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas Fungsi Komite.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Berkaitan dengan PT. BPR Central Artha dimana modal inti yang dimiliki masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka tidak wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas atau Fungsi Komite karena hanya BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) yang wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas Fungsi Komite.		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-

Penjelasan Lebih Lanjut

Berkaitan dengan PT. BPR Central Artha dimana modal inti yang dimiliki masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka tidak wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas atau Fungsi Komite karena hanya BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) yang wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas Fungsi Komite.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.	Rp0,00	0%
2.	Bowo Susanto, S.E.	Rp0,00	0%
3.	Atika Rochyati, S.E.	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Jajaran Direksi semuanya tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT. BPR Central Artha			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.			
2.	Bowo Susanto, S.E.			
3.	Atika Rochyati, S.E.			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bowo Susanto, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Atika Rochyati, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Central Artha				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bowo Susanto, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Atika Rochyati, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga antara Anggota Direksi dengan Anggota Direksi yang lain.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sapto Liyantoro	Rp759.000.000,00	7.59%
2.	Risnawati Handayani	Rp0,00	0%
3.	Hartana Satedja	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Jajaran Dewan Komisaris, hanya Sapto Liyantoro selaku Komisaris Utama yang mempunyai kepemilikan saham atas PT. BPR Central Artha yaitu sebesar Rp. 759.000.000 atau 7.59%			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sapto Liyantoro		PT. Central Maju Bersama	8%
2.	Sapto Liyantoro		PT. BPR Pujon Jaya Makmur	30%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran Dewan Komisaris, hanya Sapto Liyantoro selaku Komisaris Utama yang mempunyai kepemilikan saham di perusahaan lain yaitu saham di PT. Central Maju Bersama sebesar 8% dan saham di PT. BPR Pujon Jaya Makmur sebesar 30%				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sapto Liyantoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Risnawati Handayani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Hartana Satedja	Tidak ada	Tidak ada	Muljani Wibowo - Menerima dan/ atau Memberikan Penghasilan
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran Komisaris hanya Hartana Sutedja selaku Dewan Komisaris yang mempunyai hubungan keuangan dengan salah satu Pemegang Saham PT. BPR Central Artha yaitu Muljani Wibowo dalam kaitannya dengan menerima dan/atau memberikan penghasilan selaku pasangan suami/istri.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sapto Liyantoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Risnawati Handayani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Hartana Satedja	Tidak ada	Tidak ada	Muljani Wibowo - Pasangan (istri)
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran Komisaris hanya Hartana Sutedja selaku Dewan Komisaris yang mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu Pemegang Saham PT. BPR Central Artha yaitu Muljani Wibowo dalam kaitannya selaku pasangan suami/istri.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp991.589.217,00	3	Rp1.198.210.476,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp991.589.217,00		Rp1.198.210.476,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (3)	Kendaraan Dinas (3)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3)	BPJS Kesehatan (3)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS adalah Fasilitas Transportasi (Kendaraan Dinas) dan Fasilitas Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan)			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7.39 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.26 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.06 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.22 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.78 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan selama 1 (satu) tahun	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	14 Januari 2021	2	Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2020
2.	15 April 2021	2	Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021
3.	01 Juli 2021	2	Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021
4.	05 Oktober 2021	3	Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dan Rapat Koordinasi Penetapan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Jajaran Dewan Komisaris sebelum tanggal 10 Juli 2021 hanya berjumlah 2 (dua) orang yaitu Sdr. Sapto Liyantoro (Komisaris Utama) dan Sdri. Risnawati Handayani (Komisaris), namun berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Central Artha pada tanggal 10 Juli 2021 dan telah ditetapkan berdasarkan Akta Notaris nomor 12 tanggal 15 Juli 2021 dengan Notaris Ny. Christina Agustini, SH, Mkn di Tegal, dimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- AH 01.03-0429033 tanggal 16 Juli 2021, maka susunan Dewan Komisaris PT. BPR Central Artha menjadi 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Sapto Liyantoro (Komisaris Utama), Sdri. Risnawati Handayani (Komisaris) dan Sdr. Hartana Satedja (Komisaris)			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Sapto Liyantoro	4	0	100%
2.	Risnawati Handayani	4	0	100%
3.	Hartana Satedja	1	0	25%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran Dewan Komisaris sebelum tanggal 10 Juli 2021 hanya berjumlah 2 (dua) orang yaitu Sdr. Sapto Liyantoro (Komisaris Utama) dan Sdri. Risnawati Handayani (Komisaris), namun berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Central Artha pada tanggal 10 Juli 2021 dan telah ditetapkan berdasarkan Akta Notaris nomor 12 tanggal 15 Juli 2021 dengan Notaris Ny. Christina Agustini, SH, Mkn di Tegal, dimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH 01.03-0429033 tanggal 16 Juli 2021, maka susunan Dewan Komisaris PT. BPR Central Artha menjadi 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Sapto Liyantoro (Komisaris Utama), Sdri. Risnawati Handayani (Komisaris) dan Sdr. Hartana Satedja (Komisaris)				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	1	4	5
Telah Diselesaikan		0		0		1		5
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Terjadi 6 fraud sepanjang tahun 2021 yang dilakukan oleh 1 (satu) orang pegawai tetap dan 5 (lima) orang pegawai tidak tetap dimana dengan status 6 (enam) fraud kesemuanya telah diselesaikan.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Sampai dengan akhir tahun 2021, masih ada kasus hukum yang masih dalam proses penyelesaian yaitu kasus perdata.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Sepanjang tahun 2021 tidak ada data transaksi yang mengandung benturan kepentingan.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Sepanjang Tahun 2021 tidak melakukan kegiatan Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Central Artha
Alamat	: Jln. Dr. Sutomo No. 53 Kota Tegal
Nomor Telepon	: 0283 - 341741
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp26.284.306.000,00
Total Aset	: Rp424.172.490.705,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Central Artha Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.3 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.24	0.248
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.26	0.189
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.41	0.141
6	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.05	0.026
7	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.5	0.113
8	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
9	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.075
10	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.68	0.168
11	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.96	0.196
Nilai Komposit			1.3
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.24)

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi PT. BPR Central Artha adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional yang juga merupakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku, Seluruh anggota direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. Aspek transparansi anggota direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.26)

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Komisaris PT. BPR Central Artha adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota dewan komisaris telah lulus fit and proper test dan diangkat melalui RUPS. Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua, Dewan Komisaris PT BPR Central Artha tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan, Aspek transparansi anggota dewan komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku,

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT. BPR Central Artha dengan modal inti masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tidak berkewajiban untuk adanya Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite, karena kewajiban hanya dikenakan pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

PT. BPR Central Artha Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. Belum pernah terjadi benturan kepentingan, jika terjadi akan diungkap dalam setiap keputusan dan dilengkapi dengan risalah rapat serta diadministrasikan serta terdokumentasi, Selama ini dan sepanjang Tahun 2021 belum terjadi benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank,

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.41)

PT. BPR Central Artha sudah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan juga sudah

menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.

Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat,

Memiliki ketentuan internal mengenai penerapan fungsi kepatuhan, namun belum mencakup seluruh satuan kerja dan masih dilakukan pengkinian serta penyempurnaan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.68)

PT. BPR Central Artha sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bekerja secara independent serta obyektif.

Pelaksanaan fungsi audit internal bank telah berjalan efektif, serta pedoman internal telah sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dan disetujui direksi dan dewan komisaris.

Belum sepenuhnya melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal.

Terus melakukan menyempurnakan dan pengkinian pelaksanaan fungsi audit internal sehingga terpenuhi secara memadai dan independen,

Adanya pelaporan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris,

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.05)

PT. BPR Central Artha telah menunjuk dan menugaskan akuntan publik/ audit eksternal (KAP) sesuai ketentuan POJK dengan melalui RUPS .

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.

Kualitas dan cakupan hasil audit akuntan publik sangat baik,

Pelaksanaan audit dilakukan oleh akuntan publik (KAP) sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan,

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.96)

PT. BPR Central Artha sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan telah memiliki pedoman kerja pelaksanaan manajemen risiko sesuai peraturan perundang-undangan.

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan dan penerapan manajemen risiko secara tertulis sekaligus melakukan evaluasinya.

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.

BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.5)

PT. BPR Central Artha Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,

Tidak ada pelanggaran BMPK dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent).

Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.

Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Rencana bisnis PT. BPR Central Artha Tahun 2021 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan

Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR serta sudah didukung para Pemegang Saham dengan mempertimbangkan factor-faktor internal dan eksternal serta prinsip kehati-hatian (prudent). Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis tetap dilakukan dewan komisaris.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, terkini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem informasi manajemen bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Nilai Komposit GCG sebesar 1.3 dengan predikat Sangat Baik.

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Central Artha Tahun 2021 pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PT. BPR Central Artha selama 1 (satu) tahun. Proses kerja tersebut melalui pendekatan pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada di PT. BPR Central Artha sehingga mengupayakan tidak terdapat data/ informasi strategis dan signifikan yang tertinggal serta tidak ada penyimpangan/ pelanggaran atas kebijakan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan pedoman GCG internal bertujuan untuk mengingatkan segenap organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada pada PT. BPR Central Artha agar senantiasa melaksanakan prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Tingkatan dan jenjang organisasi ini berupa dewan komisaris, direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Pemberlakuan pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendorong direksi dengan segenap jajarannya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan dewan komisaris melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparansi dan akuntabilitas.

PT. BPR Central Artha
Jln. Dr. Sutomo No. 53 Kota Tegal
Telepon: 0283 - 341741

Website: www.bprcentralartha.com. Email: bpr.centralartha@gmail.com

Tegal, 22 April 2022

PT. BPR Central Artha

Menyetujui



ISMIYANTO, S.H., M.H., M.M.
Direktur Utama

PT. Bank Perkreditan Rakyat
Central Artha



SAPTO LIYANTORO, S.E.
Komisaris Utama